

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Ke-Hadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2021, dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja Perubahan dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas PMD untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa,

Sumber, 4 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

SUMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 050 / Kep 2250 /DPMD/ 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- (2) Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021, meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perubahan SKPD, Proses Penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan Dokumen RKPD Perubahan, Renstra SKPD dengan Renja Perubahan

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-1 atau 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n atau 2021) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Perubahan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV : PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Pasal 3

Renja Dinas (RENJA) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 04 October 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2019 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD Perubahan. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Perubahan Tahun 2021 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 yaitu : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
- 23) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
- 24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 45, Seri D);
- 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Target Kinerja dan Pagu Kegiatan (Penambahan atau pengurangan);

2. Memberikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
3. Menjaga Konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perubahan SKPD, Proses Penyusunan Renja Perubahan SKPD, Keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan Dokumen RKPD Perubahan, Renstra SKPD dengan Renja Perubahan

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n atau 2021) serta

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 6.427.945.664 dengan realisasi sejumlah Rp. 6.005.595.885 (93,43%), sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 422,349,779 (6,57%).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020 :

1. Urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas PMD melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp.)	JUMLAH REALISASI		JUMLAH SISA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
NON URUSAN		780,710,000	711,140,598	91	69,569,402	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366,106,400	311,098,798	84.97	55,007,602	15.03
1)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127,599,600	81,335,016	63.74	46,264,584	36.26
2)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	9,195,000	7,287,500	79.26	1,907,500	20.74
3)	Penyediaan alat tulis kantor	23,198,600	23,198,600	100.00	-	-
4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,706,400	16,706,400	100.00	-	-
5)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2,262,800	2,262,800	100.00	-	-
6)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94,400,000	94,150,000	99.74	250,000	0.26

7)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,440,000	15,190,000	98.38	250,000	1.62
8)	Penyediaan makanan dan minuman	19,770,000	19,770,000	100.00	-	-
9)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57,534,000	51,198,482	88.99	6,335,518	11.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394,773,600	380,211,800	96.31	14,561,800	3.69
1)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183,920,600	174,459,800	94.86	9,460,800	5.14
2)	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	9,500,000	9,500,000	100.00	-	-
3)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,248,000	89,397,000	94.85	4,851,000	5.15
4)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,370,000	9,370,000	100.00	-	-
5)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	97,735,000	97,485,000	99.74	250,000	0.26
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,419,000	6,419,000	100	-	-
1)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	450,000	450,000	100.00	-	-
2)	Penyusunan laporan keuangan semesteran	450,000	450,000	100.00	-	-
3)	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,869,000	3,869,000	100.00	-	-
4)	Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	450,000	450,000	100.00	-	-
5)	Penyusunan laporan tahunan dinas	450,000	450,000	100.00	-	-
6)	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	750,000	750,000	100.00	-	-
5	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	13,411,000	13,411,000	100.00	-	-
1)	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	13,111,000	13,111,000	100.00	-	-
2)	Penyusunan pembuatan profil dinas/badan	300,000	300,000	100.00	-	-

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp. **366,106,400** dan terealisasi sebesar Rp. **311,098,798** sisa sebesar Rp. **55,007,602** atau tercapai sebesar 84.97%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127,599,600 dan terealisasi sebesar Rp.81,335,016 sisa sebesar Rp. 46,264,584 atau tercapai sebesar 63,74%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,195,000 dan terealisasi sebesar Rp.7,287,500 sisa sebesar Rp. 1,907,500 atau tercapai sebesar 79,26%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) = 15 unit dan Roda 4 (empat) = 6 unit, total 21 unit. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23,198,600 dan terealisasi sebesar Rp.23,198,600 atau tercapai 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16,706,400 dan terealisasi sebesar Rp.16,706,400 atau tercapai 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (21 jenis). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,262,800 dan terealisasi sebesar Rp.2,262,800 atau tercapai 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- f) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,400,000 dan terealisasi sebesar Rp.94,150,000 sisa sebesar Rp. 250,000 atau tercapai sebesar 99,74%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

yang tersedia (11 jenis). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,440,000 dan terealisasi sebesar Rp.15,190,000 sisa sebesar Rp. 250,000 atau tercapai sebesar 98,38%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 1.920 eksemplar). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19,770,000 dan terealisasi sebesar Rp.19,770,000 atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan (1936 dus). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,534,000 dan terealisasi sebesar Rp. 51,198,482 sisa sebesar Rp. 6,335,518 atau tercapai sebesar 88,99%. **Output** kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (101 laporan). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 394,773,600 dan terealisasi sebesar Rp. 380,211,800 sisa sebesar Rp. 14,561,800 atau tercapai sebesar 96.31%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183,920,600 dan terealisasi sebesar Rp. 174,459,800 sisa sebesar Rp. 9,460,800 atau tercapai sebesar 94,86%. **Output** kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang terpelihara. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,500,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,500,000

atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara (1 unit). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94,248,000 dan terealisasi sebesar Rp. 89,397,000 sisa sebesar Rp. 4,851,000 atau tercapai sebesar 94,85%. **Output** kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara (15 unit roda 2 dan 6 unit roda 4 = 21 unit). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,370,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,370,000 atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (4 jenis). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- e. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,735,000 dan terealisasi sebesar Rp. 97,485,000 sisa sebesar Rp. 250,000 atau tercapai sebesar 99,74%. **Output** kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang direhab. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6,419,000 dan terealisasi sebesar Rp. 6,419,000 atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000 dan terealisasi sebesar Rp. 450,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun (3 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000 dan terealisasi sebesar Rp. 450,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - c) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,869,000 dan terealisasi sebesar Rp. 3,869,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - d) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000 dan terealisasi sebesar Rp. 450,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun (4 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - e) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000 dan terealisasi sebesar Rp. 450,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersusunnya laporan tahunan dinas (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750,000 dan terealisasi sebesar Rp. 750,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- 3) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor, alokasi anggaran sebesar Rp. 13,411,000 dan terealisasi sebesar

Rp. 13,411,000 atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Review RENSTRA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,111,000 dan terealisasi sebesar Rp. 13,111,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun (3 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.
- b. Kegiatan Penyusunan Profil Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300,000 dan terealisasi sebesar Rp.300,000 atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.	S.1	SM	SM	SD	S.2	S.1	SM	SM	SD	
2		A	P				A	P		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
2	-	-	-	-	-	-	-	2

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	2 Orang
Pejabat Fungsional	- Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan optimal.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran yang tersedia kurang memadai.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

1. Melakukan klasifikasi perjalanan dinas yang lebih ketat dalam hal menghadiri undangan kedinasan (Perjalanan Luar Daerah).
2. Menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelian/penggantian suku cadang.

E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,685,771,664 dan terealisasi sebesar Rp. 1,400,756,864 sisa sebesar Rp. 285,014,800 atau tercapai sebesar 83%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

**Program dan Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp.)	JUMLAH REALISASI		JUMLAH SISA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1,685,771,664	1,400,756,862	83,09	284,954,800	16,91
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	822,215,500	547,828,660	66.63	274,386,840	33.37
1)	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	353,142,400	248,224,840	70.29	104,917,560	29.71
2)	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanel Posyandu	55,646,600	54,647,820	98.21	998,780	1.79
3)	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	151,005,500	76,320,000	50.54	74,685,500	49.46
4)	Pelatihan P3MD	108,871,000	58,021,000	53.29	50,850,000	46.71
5)	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	64,921,000	49,771,000	76.66	15,150,000	23.34
6)	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	88,629,000	60,844,000	68.65	27,785,000	31.35
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63,506,800	62,955,800	99.13	551,000	0.87
1)	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	34,986,800	34,935,800	99.85	51,000	0.15
2)	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd	28,520,000	28,020,000	98.25	500,000	1.75

3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	189,777,100	184,578,140	97.26	5,138,960	2.71
1)	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	61,426,500	61,366,500	99.90	60,000	0.10
2)	Fasiltasi TMMD dan TMSS	110,471,600	105,332,640	95.35	5,138,960	4.65
3)	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	7,799,500	7,799,500	100.00	-	-
4)	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	10,079,500	10,079,500	100.00	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	610,272,264	605,394,264	99.20	4,878,000	0.80
1)	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	52,843,800	52,774,800	99.87	69,000	0.13
2)	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	82,311,600	82,242,600	99.92	69,000	0.08
3)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98,552,400	98,552,400	100.00	-	-
4)	Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah desa	376,564,464	371,824,464	98.74	4,740,000	1.26

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 822,215,500 dan terealisasi sebesar Rp. 547,828,660 sisa sebesar Rp. 274,386,840 atau tercapai sebesar 66,63%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353,142,400 dan terealisasi sebesar Rp. 248,224,840 sisa sebesar Rp.104,917,560 atau tercapai sebesar 70,29%. **Output** kegiatan adalah Jumlah kader PKK Desa yang dilatih (1860 orang), **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjnal Posyandu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55,646,600 dan terealisasi sebesar Rp. 54,647,820 sisa sebesar Rp. 998,780 atau tercapai sebesar 98,21%. **Output** kegiatan adalah Jumlah strata posyandu mandiri (15 posyandu). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- c) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151,005,500 dan terealisasi sebesar Rp. 76,320,000 sisa sebesar Rp.74,685,500 atau tercapai sebesar 50,54%. **Output** kegiatan adalah Jumlah

kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih (160 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

- d) Kegiatan Pelatihan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108,871,000 dan terealisasi sebesar Rp.58,021,000 sisa sebesar Rp. 50,850,000 atau tercapai sebesar 53,29%. **Output** kegiatan adalah Jumlah peserta P3MD yang dilatih (400 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT/RW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64,921,000 dan terealisasi sebesar Rp.49,771,000 sisa sebesar Rp. 15,150,000 atau tercapai sebesar 76,66%. **Output** kegiatan adalah Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (250 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- f) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi LPMD/K, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88,629,000 dan terealisasi sebesar Rp.60,844,000 sisa sebesar Rp. 27,785,000 atau tercapai sebesar 68,65%. **Output** kegiatan adalah Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih (590 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 63,506,800 dan terealisasi sebesar Rp. 62,955,800 sisa sebesar Rp. 551,000 atau tercapai sebesar 99,13%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,986,800 dan terealisasi sebesar Rp. 34,935,800 sisa sebesar Rp. 51,000 atau tercapai sebesar 99,85%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (80 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- b) Kegiatan Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28,520,000 dan terealisasi sebesar Rp.28,020,000 sisa sebesar Rp. 500,000 atau tercapai sebesar 98,25%. **Output** kegiatan adalah Jumlah

kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan kapasitasnya, Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan (Jumlah Total Aset :Rp. 6,3 milyar, jumlah kelompok 116). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 189,777,100 dan terealisasi sebesar Rp. 184,578,140 sisa sebesar Rp. 5,138,960 atau tercapai sebesar 97,26%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61,426,500 dan terealisasi sebesar Rp. 61,366,500 sisa sebesar Rp. 60,000 atau tercapai 99,90%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes (20 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- b) Kegiatan Fasilitasi TMMD dan BSMSS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110,471,600 dan terealisasi sebesar Rp. 105,332,640 sisa sebesar Rp. 5,138,960 atau tercapai 95,35%. **Output** kegiatan adalah Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS (55 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- c) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,799,500 dan terealisasi sebesar Rp.7,799,500 atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi (412 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- d) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,079,500 dan terealisasi sebesar Rp.10,079,500 atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Kawasan perdesaan yang dibentuk (2 kawasan). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang

berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 610,272,264 dan terealisasi sebesar Rp. 605,394,264 sisa sebesar Rp. 4,878,000 atau tercapai sebesar 99,20%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52,843,800 dan terealisasi sebesar Rp. 52,774,800 sisa sebesar Rp. 69,000 atau tercapai sebesar 99,87%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang dievaluasi tata kelola pemerintahannya (40 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- b) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82,311,600 dan terealisasi sebesar Rp. 82,242,600 sisa sebesar Rp. 69,000 atau tercapai sebesar 99,92%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan profil desanya (60 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98,552,400 dan terealisasi sebesar Rp. 98,552,400 atau tercapai sebesar 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah desa yang dimonev tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (240 desa). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- d) Kegiatan Penguatan kapasitas penyelenggara pemerintah desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 376,564,464 dan terealisasi sebesar Rp. 371,824,464 sisa sebesar Rp. 4,740,000 atau tercapai sebesar 98,74%. **Output** kegiatan adalah Jumlah aparatur desa yang dilatih (915 orang). **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
4	6	-	-	-	-	-	-	10

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	10 Orang
Pejabat Fungsional	- Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan optimal.

D. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, terdapat permasalahan sebagai berikut :
Belum adanya inovasi TP PKK terkait IDM.
- b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjnal Posyandu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peran pokjnal posyandu belum optimal dalam peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

- c) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurangnya inovasi dan skill KPM.
- d) Kegiatan Pelatihan P3MD, terdapat permasalahan sebagai berikut :Rendahnya partisipasi peserta P3MD.
- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, terdapat permasalahan sebagai berikut : Rendahnya pendidikan dan skill pengurus RT/RW.
- f) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, terdapat permasalahan sebagai berikut : Rendahnya kapasitas pengurus LPMD.
- g) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum optimalnya peran BUMDes dalam pembangunan desa (kontribusi terhadap PADes)
- h) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut :Belum optimalnya tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, diantaranya adalah :Melakukan pembinaan dan pengarahan tentangnya pentingnya inovasi berkelanjutan dari pengurus TP PKK beserta para kader PKK terkait peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanel Posyandu, diantaranya adalah : Mengoptimalkan peran aktif kader-kader posyandu dalam peningkatan Indeks Desa Membangun, khususnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) di desa.
- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya adalah :Mendorong para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) agar lebih berperan aktif dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi membangun desa sehingga mampu meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial masyarakat desa.
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan P3MD, diantaranya adalah :Membina secara para Peserta P3MD secara berkelanjutan mengenai peran strategis masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

- e) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, diantaranya adalah :Melakukan kualifikasi strata pendidikan bagi pengurus RT/RW.
- f) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, diantaranya adalah :meningkatkan wawasan keilmuan dan skill bagi pengurus LPMD serta mampu diaplikasikan sesuai kondisi dan potensi desa masing-masing.
- g) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diantaranya adalah :Melakukan pembinaan dan pengembangan BumDes sesuai potensi dan sumber daya desa, sehingga BumDes lebih berperan secara optimal dalam berkontribusi pada PADes/pembangunan desa.
Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, diantaranya adalah :Mengoptimalkan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa melalui pembinaan dan pelatihan yang aplikatif.

(6) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

-

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Renstra SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*
Kabupaten Cirebon

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun 2020) n-1		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2020)				
			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran														
2 07 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	100%	3	Rekening	3	Rekening	100%
2 07 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	100%	21	Unit	21	Unit	100%
2 07 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	100%	47	Jenis	47	Jenis	100%
2 07 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	100%	21	Jenis	21	Jenis	100%
2 07 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	3	Jenis	3	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	100%	3	Jenis	3	Jenis	100%
2 07 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	11	Jenis	11	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	100%	11	Jenis	11	Jenis	100%
2 07 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	9.600	Exemplar (3 media)	1.920	Exemplar	2.640	Exemplar	2.640	Exemplar	100%	1.920	Exemplar	1.920	Exemplar	100%
2 07 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	9.680	Dus	1.936	Dus	2.068	Dus	2.068	Dus	100%	1.936	Dus	1.936	Dus	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019		Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)		Target Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun 2020) n-1		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	07	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	745	Laporan	149	Laporan	160	Kali	160	Kali	100%	101	Laporan	101	Laporan	100%
2	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur														
2	07	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	3	Unit	100%
2	07	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	100%
2	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	100%	21	Jenis	21	Jenis	100%
2	07	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	4	Jenis	4	Jenis	100%
2	07	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah luasan direhab	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	4	Unit	4	Unit	100%
2	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas														
2	07	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	30	stel	30	stel	30	stel	30	stel	100%	0	stel	0	stel	0
2	07	01	03	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30	Stel	0	0	30	Stel	30	Stel	100%	0	Stel	0	Stel	0
2	07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif														
2	07	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
2	07	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	07	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	07	01	06	15	Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)		Target Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun 2020) n-1		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
2 07 01 06 16	Penyusunan Laporan Tahunan Badan	tersusunnya laporan tahunan dinas	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2 07 01 06 17	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2 07 01 07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral														
2 07 01 07 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
2 07 01 07 02	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2 07 01 07 03	Penyusunan Pembuatan Profil Badan	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2 07 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif														
2 07 01 15 06	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	1600	Orang	320	Orang	320	Orang	320	Orang	100%	1.860	Orang	1.860	Orang	100%
2 07 01 15 07	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjnal Posyandu	Jumlah strata posyandu mandiri	400	Posyandu Mandiri	50	Posyandu Mandiri	50	Posyandu Mandiri	56	Posyandu Mandiri	112%	15	Posyandu Mandiri	15	Posyandu Mandiri	108%
2 07 01 15 08	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	412	Desa	412	Desa	412	Desa	412	Desa	100%	82	Desa	82	Desa	100%
2 07 01 15 10	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	780	Orang	156	Orang	156	Orang	156	Orang	100%	160	Orang	160	Orang	100%
2 07 01 15 11	Pelatihan P3MD	Jumlah peserta P3MD yang dilatih	2000	Orang	400	Orang	509	Orang	509	Orang	100%	400	Orang	400	Orang	100%
2 07 01 15 14	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	750	Orang	112	Orang	179	Orang	179	Orang	100%	250	Orang	250	Orang	100%
2 07 01 15 15	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	750	Orang	117	Orang	168	Orang	168	Orang	100%	590	Orang	590	Orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)		Target Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun 2020) n-1		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1					2	3	4		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
2	07	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik														
2	07	01	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	190	Desa	40	Desa	40	Desa	45	Desa	112%	80	Desa	80	Desa	150%
2	07	01	16	11	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	10	Inovasi	2	Inovasi	2	Inovasi	1	Inovasi	50%	2	Inovasi	2	Inovasi	100%
2	07	01	16	12	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	150	Keluarga	20	Keluarga	180	Keluarga	180	Keluarga	100%	0	Keluarga	0	Keluarga	0
2	07	01	16	13	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Jumlah desa yg dibentuk posyantek	5	Posyantek	1	Posyantek	1	Posyantek	1	Posyantek	100%	0	Posyantek	0	Posyantek	0
2	07	01	16	14	Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd	Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya. Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan	62	Milyar	60	Milyar	60	Milyar	55	Milyar	92%	63,5 116	Milyar kelompok	63,5 116	Milyar kelompok	100%
2	07	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi														
2	07	01	17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	412	Desa	68	Desa	68	Desa	68	Desa	100%	20	Desa	20	Desa	100%
2	07	01	17	05	Fasilitasi TMMD dan BSMSS	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	750	Orang	150	Orang	150	Orang	150	Orang	100%	55	Orang	55	Orang	100%
2	07	01	17	08	Penyelenggaraan Perlombaan Desa	Jumlah desa terbaik Tingkat kabupaten	30	Desa	6	Desa	6	Desa	6	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	17	12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412	Desa	412	Desa	412	Desa	412	Desa	100%	412	Desa	412	Desa	100%
2	07	01	17	14	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	Jumlah desa yg dilatih peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya desa	412	Desa	424	Desa	110	Desa	110	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	17	15	Fasilitasi Penataan Batas Desa	Jumlah desa yg difasilitasi penataan batas desanya	50	Desa	10	Desa	10	Desa	10	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	17	16	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Jumlah Kawasan perdesaan yg dibentuk	0	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	0	2	Kawasan	2	Kawasan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)		Target Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun 2020) n-1		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	07	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)														
2	07	01	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	412	Desa	412	Desa	219	Desa	219	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	412	Desa	180	Desa	106	Desa	106	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	06	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	40	Desa	40	Desa	100%
2	07	01	18	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Fasilitasi Pemilihan Kuwu	Jumlah desa yang dimonev pelaksanaan pilwu	412	Desa	0	Desa	187	Desa	187	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	100%
2	07	01	18	14	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil desa yang disusun	175	Desa	35	Desa	35	Desa	35	Desa	100%	60	Desa	60	Desa	100%
2	07	01	18	15	Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih	412	Desa	160	Desa	139	Desa	139	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	17	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa	Jumlah desa yg dilatih penyusunan perdes	10	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	18	Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	Jumlah desa yang dimonev ttg adm.pemerintahan desa	412	Desa	0	Desa	187	Desa	177	Desa	94,7%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di Monev	412	Desa	412	Desa	412	Desa	412	Desa	100%	240	Desa	240	Desa	100%
2	07	01	18	20	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	Jumlah desa yang difasilitasi	50	Desa	10	Desa	10	Desa	10	Desa	100%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	21	Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih	Jumlah kuwu yg dilantik	412	Desa	0	Desa	177	Desa	176	Desa	99,4%	0	Desa	0	Desa	0
2	07	01	18	22	Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perbup yang dievaluasi	9	Perbup	3	Perbup	3	Perbup	3	Perbup	100%	0	Perbup	0	Perbup	0
2	07	01	18	23	Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	915	Orang	915	Orang	100%
2	07	01	20		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan pendamping desa														
2	07	01	20	01	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	Meningkatnya kapasitas fasilitator kecamatan	600	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	120	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	120	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	120	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	100%	0	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	0	Aparatur Kec dan Pendamping Desa	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM /Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proye ksi Th 2022 (Th n+1)	Catatan Analisis
				Th 2018 (n-2)	Th 2019 (n-1)	Th 2020 (Th n)	Th 2021 (n+1)	Th 2019 (n-2)	Th 2020 (n-1)		
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-	IDM	-	2 Desa	5 Desa	28 desa	2 Desa	7 Desa (100%)	49 Desa	
2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	-	IKS	-	0,81 Poin	0,81 Poin	0,84 Poin	0,71 Poin	0,76 Poin (94,41 %)	-	
3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	-	IKE	-	0,78 Poin	0,84 Poin	0,85 Poin	0,59 Poin	0,61 Poin (78,12 %)	-	
4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	-	IKL	-	0,78 Poin	0,78 Poin	0,80 Poin	0,63 Poin	0,66 Poin (84,33 %)	-	
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun		IDM				0,73	-	-	0,74	
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa		Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa				20 %	-	-	40%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	IKM	-	-	3,55 Poin	3,55 Poin	3,55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2) Tingkat kehadiran aparat pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2021
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				
				Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.786.913.733	14.320.157.282
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.786.913.733	14.320.157.282
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	470.575.228	410.101.228
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	75 %	316.873.000	317.017.000
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	100 %	4.142.010.025	4.745.366.500
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 %	100 %	43.306.700	43.306.700
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	100 %	29.999.300	29.999.300
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		1 Dok	1 Dok	56.217.500	56.217.500
2.13.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.300	29.999.300
		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	Sumber	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
2.13.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Sumber	4 Dokumen	4 Dokumen	9.137.800	9.137.800
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Sumber	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
2.13.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	17.080.400	17.080.400

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun		45 Dok	45 Dok	4.732.063.500	4.732.063.500
2.13.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kabupaten Cirebon	30 Pegawai	30 Pegawai	4.111.618.525	4.714.975.000
2.13.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	8.559.600	8.559.600
2.13.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun	Sumber	18 Dokumen	18 Dokumen	8.528.900	8.528.900
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana		1 Jenis	1 Jenis	30.391.500	30.391.500
2.13.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Sumber	30 Stel	60 Stel	30.391.500	30.391.500
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor		7 Jenis	7 Jenis	249.032.200	249.032.200
2.13.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Sumber	1 Jenis	3 Jenis	9.194.400	9.194.400
2.13.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Sumber	8 Jenis	4 Jenis	47.438.900	47.438.900
2.13.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	KABUPATEN CIREBON	2.387 Dus	1.950 Dus	28.380.000	28.380.000
2.13.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sumber	21 Jenis	18 Jenis	45.024.600	45.024.600
2.13.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Sumber	2.880 Exmplar	3.020 Exmplar	21.510.000	21.510.000
2.13.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Sumber	47 Jenis	47 Jenis	58.001.800	58.001.800
2.13.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Sumber	2.387 Dus	0 Dus	-	-
2.13.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sumber	105 Laporan	20 Laporan	99.956.500	39.482.500
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun		1 Jenis	6 Jenis	151.919.028	151.919.028
2.13.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Sumber	3 Rekening	3 Rekening	115.199.028	115.199.028
2.13.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	KABUPATEN CIREON	1 Jenis	3 Jenis	36.720.000	36.720.000
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara		1 Tahun	1 Tahun	326.167.000	326.167.000
2.13.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sumber	14 Unit	14 Unit	105.325.000	105.325.000

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	Sumber	21 Unit	21 Unit	9.150.000	9.150.000
2.13.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sumber	4 Jenis	0 Jenis	-	-
2.13.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sumber	3 unit	3 unit	211.548.000	211.692.000
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi		6 lembaga	6 lembaga	203.760.600	88.483.000
		Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		80 Desa	80 Desa	-	-
		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya			2,42 Prosen	-	129.198.900
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya		1 Desa	10 Desa	217.681.900	217.681.900
2.13.02.02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon		10 Desa	-	58.592.600
2.13.02.02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Kabupaten Cirebon	55 Orang	0 Orang	203.760.600	88.483.000
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Kabupaten Cirebon	412 Desa	412 Desa	-	-
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Kabupaten Cirebon		412 Desa	-	70.606.300
		Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	Kabupaten Cirebon	82 Desa	0 Desa	-	-
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan		2 lembaga/orang	2 lembaga/orang	111.150.300	7.718.400
		Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa			3,15 Prosen	-	294.512.900
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		13 Desa	13 Desa	302.231.300	302.231.300
2.13.03.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	Kabupaten Cirebon	2 Kawasan	0 Kawasan	111.150.300	7.718.400
2.13.03.03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Kabupaten Cirebon		0 Desa	-	-
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Kabupaten Cirebon		0 Jenis	-	44.512.900
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Kabupaten Cirebon		6 Jenis	-	250.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)		40 Desa	40 Desa	1.019.128.200	5.210.964.393
		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi		6 lembaga/orang	6 lembaga/orang	65.201.500	40.776.500
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik		3 Desa	3 Desa	175.505.900	6.097.000
		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu			12,13 Prosen	-	
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM		880 Orang	880 Orang	7.308.753.824	
2.13.04.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Rakor	4 Rakor	107.789.400	431.701.600
		Jumlah Rakor yang di laksanakan	Kabupaten Cirebon		1 Rakor	-	4.962.000
		Jumlah desa yang di Monev	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	-	-
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Kabupaten Cirebon	7 Sistem	7 Sistem	-	-
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Kabupaten Cirebon		7 sistem	-	-
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Cirebon	40 Desa/Kecamatan	40 Desa/Kecamatan	-	-
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Cirebon		40 Desa/Kecamatan	-	32.180.200
2.13.04.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi	Kabupaten Cirebon	3 Perbup	0 Perbup	-	-
2.13.04.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Kabupaten Cirebon		73 Desa	-	11.246.000
		Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	Kabupaten Cirebon		1 Dok	-	4.873.500
2.13.04.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	177 Orang	100 Orang	322.409.900	34.821.400
		Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar	Kabupaten Cirebon		5.048 Orang	-	1.516.777.031
		Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatannya	Kabupaten Cirebon	5.048 Orang	5.048 Orang	-	4.550.009.193
2.13.04.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon	20 desa	20 desa	65.201.500	40.776.500
		Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon		20 Desa	-	24.425.000
2.13.04.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Kabupaten Cirebon	80 Desa	0 Desa	175.505.900	6.097.000
		Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Kabupaten Cirebon		43 Desa	-	142.816.200

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.04.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Kabupaten Cirebon	135 Desa	135 Desa	473.304.000	84.609.300
		Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Kabupaten Cirebon		135 Desa	-	308.795.500
2.13.04.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon	80 Desa	80 Desa	115.624.900	109.822.900
		Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon		80 Desa	-	4.840.500
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		80 Desa	80 Desa	1.009.128.230	433.937.180
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik		3 Desa	3 Desa	200.274.750	9.282.000
		Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif			20,39 Prosen	-	502.480.350
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas		5 jenis	5 jenis	945.699.530	945.699.530
2.13.05.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kabupaten Cirebon	160 Orang	0 Orang	1.009.128.230	433.937.180
		Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon		100 Orang	-	93.702.000
		Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Kabupaten Cirebon	400 orang	0 orang	-	-
		Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Kabupaten Cirebon	250 Orang	30 Orang	-	-
		Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Kabupaten Cirebon	590 Orang	33 Orang	-	-
		Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Kabupaten Cirebon	15 Posyandu	15 Posyandu	-	-
		Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon	1.860 Orang	135 Orang	-	-
2.13.05.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon	25 Keluarga	0 Keluarga	140.275.000	7.875.000
		Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon		25 Keluarga	-	132.400.000
		Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	116 Kelompok	0 Kelompok	-	-
		Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon		116 Kelompok	-	-
		Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Kabupaten Cirebon	64,5M Rupiah	0 Rupiah	-	-
		Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Kabupaten Cirebon		65 M Rupiah	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.05.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Kabupaten Cirebon	2 Inovasi	0 Inovasi	59.999.750	1.407.000
2.13.05.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	Kabupaten Cirebon		40 Desa	-	276.378.350
J U M L A H						7.786.913.733	14.320.157.282

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2021, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2021.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, RKP Tahun 2021 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri, dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatkan Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun
	Meningkatkan Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);

- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparaturnya Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.786.913.733	14.320.157.282	6.533.243.549		
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.786.913.733	14.320.157.282	6.533.243.549		
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	470.575.228	410.101.228	(60.474.000)		
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	75 %	316.873.000	317.017.000	144.000		
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	100 %	4.142.010.025	4.745.366.500	603.356.475		
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 %	100 %	43.306.700	43.306.700	-		
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	100 %	29.999.300	29.999.300	-		
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		1 Dok	1 Dok	56.217.500	56.217.500	-		
2.13.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.300	29.999.300	-	PIS	PIS
		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	Sumber	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
2.13.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Sumber	4 Dokumen	4 Dokumen	9.137.800	9.137.800	-	PIS	PIS
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Sumber	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
2.13.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	17.080.400	17.080.400	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun		45 Dok	45 Dok	4.732.063.500	4.732.063.500	-		
2.13.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kabupaten Cirebon	30 Pegawai	30 Pegawai	4.111.618.525	4.714.975.000	603.356.475	PIS	PIS
2.13.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	8.559.600	8.559.600	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun	Sumber	18 Dokumen	18 Dokumen	8.528.900	8.528.900	-	PIS	PIS
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana		1 Jenis	1 Jenis	30.391.500	30.391.500	-		
2.13.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Sumber	30 Stel	60 Stel	30.391.500	30.391.500	-	PIS	PIS
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor		7 Jenis	7 Jenis	249.032.200	249.032.200	-		
2.13.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Sumber	1 Jenis	3 Jenis	9.194.400	9.194.400	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Sumber	8 Jenis	4 Jenis	47.438.900	47.438.900	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	KABUPATEN CIREBON	2.387 Dus	1.950 Dus	28.380.000	28.380.000	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sumber	21 Jenis	18 Jenis	45.024.600	45.024.600	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Sumber	2.880 Exmplar	3.020 Exmplar	21.510.000	21.510.000	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Sumber	47 Jenis	47 Jenis	58.001.800	58.001.800	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Sumber	2.387 Dus	0 Dus	-	-	-		
2.13.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sumber	105 Laporan	20 Laporan	99.956.500	39.482.500	(60.474.000)	PIS	PIS
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun		1 Jenis	6 Jenis	151.919.028	151.919.028	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Sumber	3 Rekening	3 Rekening	115.199.028	115.199.028	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	KABUPATEN CIREON	1 Jenis	3 Jenis	36.720.000	36.720.000	-	PIS	PIS
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara		1 Tahun	1 Tahun	326.167.000	326.167.000	-		
2.13.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sumber	14 Unit	14 Unit	105.325.000	105.325.000	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	Sumber	21 Unit	21 Unit	9.150.000	9.150.000	-	PIS	PIS
2.13.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sumber	4 Jenis	0 Jenis	-	-	-		
2.13.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sumber	3 unit	3 unit	211.548.000	211.692.000	144.000	PIS	PIS
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi		6 lembaga	6 lembaga	203.760.600	88.483.000	(115.277.600)		
		Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		80 Desa	80 Desa	-	-	-		
		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya			2,42 Prosen	-	129.198.900	129.198.900		
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya		1 Desa	10 Desa	217.681.900	217.681.900	-		
2.13.02.02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon		10 Desa	-	58.592.600	58.592.600	PIS	
2.13.02.02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Kabupaten Cirebon	55 Orang	0 Orang	203.760.600	88.483.000	(115.277.600)	PIS	PIS
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Kabupaten Cirebon	412 Desa	412 Desa	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Kabupaten Cirebon		412 Desa	-	70.606.300	70.606.300	PIS	
		Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	Kabupaten Cirebon	82 Desa	0 Desa	-	-	-		
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan		2 lembaga/oran g	2 lembaga/oran g	111.150.300	7.718.400	(103.431.900)		
		Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa			3,15 Prosen	-	294.512.900	294.512.900		
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		13 Desa	13 Desa	302.231.300	302.231.300	-		
2.13.03.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	Kabupaten Cirebon	2 Kawasan	0 Kawasan	111.150.300	7.718.400	(103.431.900)	PIS	PIS
2.13.03.03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Kabupaten Cirebon		0 Desa	-	-	-		
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Kabupaten Cirebon		0 Jenis	-	44.512.900	44.512.900	PIS	
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Kabupaten Cirebon		6 Jenis	-	250.000.000	250.000.000	Banpro v	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)		40 Desa	40 Desa	1.019.128.200	5.210.964.393	4.191.836.193		
		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi		6 lembaga/oran g	6 lembaga/oran g	65.201.500	40.776.500	(24.425.000)		
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik		3 Desa	3 Desa	175.505.900	6.097.000	(169.408.900)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu			12,13 Prosen	-	2.050.915.931	2.050.915.931		
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM		880 Orang	880 Orang	7.308.753.824	7.308.753.824	-		
2.13.04.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Rakor	4 Rakor	107.789.400	431.701.600	323.912.200	PIS	PIS
		Jumlah Rakor yang di laksanakan	Kabupaten Cirebon		1 Rakor	-	4.962.000	4.962.000	PIS	
		Jumlah desa yang di Monev	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	-	-	-		
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Kabupaten Cirebon	7 Sistem	7 Sistem	-	-	-		
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Kabupaten Cirebon		7 sistem	-	-	-		
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Cirebon	40 Desa/Kecamatan	40 Desa/Kecamatan	-	-	-		
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Cirebon		40 Desa/Kecamatan	-	32.180.200	32.180.200	PIS	
2.13.04.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi	Kabupaten Cirebon	3 Perbup	0 Perbup	-	-	-		
2.13.04.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Kabupaten Cirebon		73 Desa	-	11.246.000	11.246.000	PIS	
		Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	Kabupaten Cirebon		1 Dok	-	4.873.500	4.873.500	PIS	
2.13.04.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	177 Orang	100 Orang	322.409.900	34.821.400	(287.588.500)	PIS	PIS
		Jumlah BPJS Kuuw dan Perangkat Desa yang dibayar	Kabupaten Cirebon		5.048 Orang	-	1.516.777.031	1.516.777.031	PIS	
		Jumlah Kuuw dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatannya	Kabupaten Cirebon	5.048 Orang	5.048 Orang	-	4.550.009.193	4.550.009.193	PIS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	ertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.04.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon	20 desa	20 desa	65.201.500	40.776.500	(24.425.000)	PIS	PIS
		Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon		20 Desa	-	24.425.000	24.425.000	PIS	
2.13.04.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Kabupaten Cirebon	80 Desa	0 Desa	175.505.900	6.097.000	(169.408.900)	PIS	PIS
		Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Kabupaten Cirebon		43 Desa	-	142.816.200	142.816.200	PIS	
2.13.04.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Kabupaten Cirebon	135 Desa	135 Desa	473.304.000	84.609.300	(388.694.700)	PIS	PIS
		Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Kabupaten Cirebon		135 Desa	-	308.795.500	308.795.500	PIS	
2.13.04.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon	80 Desa	80 Desa	115.624.900	109.822.900	(5.802.000)	PIS	PIS
		Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon		80 Desa	-	4.840.500	4.840.500	PIS	
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		80 Desa	80 Desa	1.009.128.230	433.937.180	(575.191.050)		
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik		3 Desa	3 Desa	200.274.750	9.282.000	(190.992.750)		
		Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif			20,39 Prosen	-	502.480.350	502.480.350		
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas		5 jenis	5 jenis	945.699.530	945.699.530	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.05.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kabupaten Cirebon	160 Orang	0 Orang	1.009.128.230	433.937.180	(575.191.050)	PIS	PIS
		Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon		100 Orang	-	93.702.000	93.702.000	PIS	
		Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Kabupaten Cirebon	400 orang	0 orang	-	-	-		
		Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Kabupaten Cirebon	250 Orang	30 Orang	-	-	-		
		Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Kabupaten Cirebon	590 Orang	33 Orang	-	-	-		
		Jumlah pokjnal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Kabupaten Cirebon	15 Posyandu	15 Posyandu	-	-	-		
		Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon	1.860 Orang	135 Orang	-	-	-		
2.13.05.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon	25 Keluarga	0 Keluarga	140.275.000	7.875.000	(132.400.000)	PIS	PIS
		Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon		25 Keluarga	-	132.400.000	132.400.000	PIS	
		Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	116 Kelompok	0 Kelompok	-	-	-		
		Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon		116 Kelompok	-	-	-		
		Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Kabupaten Cirebon	64,5 Rupiah	0 Rupiah	-	-	-		
		Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Kabupaten Cirebon		65.000.000.000 Rupiah	-	-	-		
2.13.05.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Kabupaten Cirebon	2 Inovasi	0 Inovasi	59.999.750	1.407.000	(58.592.750)	PIS	PIS
2.13.05.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	Kabupaten Cirebon		40 Desa	-	276.378.350	276.378.350	PIS	
JUMLAH						7.786.913.733	14.320.157.282	6.533.243.549		

BAB IV. P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencana antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2021, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Perubahan tahun 2021 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Sumber, 4 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1001